

**RENCANA KERJA
KECAMATAN SALAM
TAHUN 2023**



**KECAMATAN SALAM
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
PERATURAN BUPATI	iii
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	25
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	37
BAB V PENUTUP	38
Lampiran		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2022	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Salam Kabupaten Magelang	21
Tabel 3.1	Perbandingan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	30



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi program, kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 33);

13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja dan rencana Tahun 2023 yang disertai pagu indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2023.

Pasal 2

- (1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Renja Dinas Kesehatan;
 - c. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
 - f. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - i. Renja Dinas Pertanian dan Pangan;
 - j. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Renja Dinas Perhubungan;
 - n. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - p. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - r. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - s. Renja Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - t. Renja Sekretariat Daerah;
 - u. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- v. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - w. Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - x. Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - y. Renja Inspektorat;
 - z. Renja Kecamatan Salaman;
 - aa. Renja Kecamatan Borobudur;
 - bb. Renja Kecamatan Ngluwar;
 - cc. Renja Kecamatan Salam;
 - dd. Renja Kecamatan Srumbung;
 - ee. Renja Kecamatan Dukun;
 - ff. Renja Kecamatan Sawangan;
 - gg. Renja Kecamatan Muntilan;
 - hh. Renja Kecamatan Mungkid;
 - ii. Renja Kecamatan Mertoyudan;
 - jj. Renja Kecamatan Tempuran;
 - kk. Renja Kecamatan Kajoran;
 - ll. Renja Kecamatan Kaliangkrik;
 - mm. Renja Kecamatan Bandongan;
 - nn. Renja Kecamatan Candimulyo;
 - oo. Renja Kecamatan Pakis;
 - pp. Renja Kecamatan Ngablak;
 - qq. Renja Kecamatan Grabag;
 - rr. Renja Kecamatan Tegalrejo;
 - ss. Renja Kecamatan Secang;
 - tt. Renja Kecamatan Windusari; dan
 - uu. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (3) Isi beserta uraian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

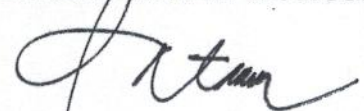
Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas izin Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun 2023 telah selesai

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini merupakan salah satu dokumen yang disusun dengan memedomani Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun ini tidak berarti tanpa adanya komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran perangkat daerah serta dukungan berbagai pihak. Masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusun nya dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 ini diucapkan terima kasih

Salam, 8 Juli 2022



WIHARIYANTO, S.H, M.M.
Penata Tk I
NIP. 19780417 199803 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan setiap daerah dan perangkat daerah untuk menyusun beberapa dokumen perencanaan yang meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Salah satu dokumen perencanaan jangka pendek yang harus disusun oleh Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi Renja PD. Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Adapun tahapan dalam penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut :

- Persiapan penyusunan Renja PD;
- Penyusunan rancangan awal Renja PD;
- Penyusunan rancangan Renja PD;
- Forum PD / Lintas PD;
- Perumusan rancangan akhir Renja PD;
- Penetapan Renja PD;

Berkaitan dengan hal di atas, disusunlah Renja PD Kecamatan Salam tahun 2023

Penyusunan dokumen Rencana Kerja PD Kecamatan Salam tahun 2023 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD tahun 2023 serta evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Dokumen ini juga tidak bisa dilepaskan dari arahan yang termuat dalam perubahan RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 dan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Salam tahun 2019-2024. Hal tersebut untuk menjamin kesesuaian antara matrik program, kegiatan, sub kegiatan, maupun indikator antar dokumen perencanaan sehingga tercipta keselarasan.

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Salam akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2023. Selain itu, dokumen ini juga berfungsi sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja Kecamatan Salam adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 26 Tahun 2019 tentang

Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 33);

16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 31);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Salam tahun 2023 adalah untuk menetapkan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan situasi serta kondisi terkini serta hasil evaluasi

Adapun tujuan dibuatnya Rencana Kerja (Renja) 2023 ini adalah :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan;
2. Memberikan acuan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan sasaran, indikator kinerja, serta lokasi;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahun 2023;
4. Menyediakan dokumen yang menjadi dasar pengendalian program, kegiatan, sub kegiatan serta pelaksanaan koordinasi baik internal maupun eksternal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Salam Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) tahun 2023, serta tahapan yang ditempuh.
- BAB II : Evaluasi Renja. Berisi narasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Salam sampai dengan triwulan IV tahun 2021 serta evaluasi tahun berjalan (2022)
- BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Memuat tentang tujuan dan sasaran renja Perangkat Daerah,

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan. Berisi tentang perencanaan kerja dan rencana pendanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan tahun 2023.

BAB V : Penutup. Berisi uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan tindak lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun 2023.

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja, perlu dilihat hasil pelaksanaan rencana kerja sampai dengan triwulan III tahun

2021 Dari hasil evaluasi tersebut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dapat berjalan sesuai rencana maupun sebaliknya. Dengan demikian hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan rencana yang disusun melalui rencana kerja perangkat daerah

Sampai dengan tahun 2021 realisasi Program dan Kegiatan secara keseluruhan dapat memenuhi / mendekati target. Memang terdapat beberapa sub kegiatan yang kemudian memerlukan usaha ekstra dalam mencapai target kinerjanya. Misalnya saja desa lunas PBB dan pelaksanaan festival budaya yang banyak terdampak oleh pandemi Covid-19 sehingga dengan terganggunya ekonomi secara global di masyarakat dan penegakan protocol kesehatan tentu menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi target. Namun demikian capaian kinerja secara umum tidak menyurutkan optimisme ke depan bahwa target akhir renstra juga akan tercapai

Hambatan-hambatan yang terjadi baik berupa faktor internal maupun faktor eksternal akan terus diupayakan untuk selalu teratasi

Hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2021 sampai dengan triwulan II dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)*
Kabupaten Magelang

Perangkat Daerah : Kecamatan Salam

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan tahun 2022 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				K	K	K	K		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota								
		Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	100	100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	132	37	39	100	37	76.00	57.58

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan tahun 2022 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tersusun	2	1	1	100	0	1.00	50.00
		Jumlah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tersusun	8	2	2	100	2	4.00	50.00
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun	7	1	1	100	1	2.00	28.57
		Jumlah Dokumen RPTK yang tersusun	4	1	1	100	1	2.00	50.00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah dokumen Laporan tahunan yang tersusun	16	4	4	100	1	5.00	31.25
		Jumlah Dokumen SOP yang tersusun	9	5	5	100	1	6.00	66.67
		Jumlah Dokumen SP yang tersusun	8	5	5	100	1	6.00	75.00

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan tahun 2022 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Daftar Informasi Publik yang tersusun	4	1	1	100	1	2.00	50.00
		Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun (RTP dan Evaluasi RTP)	4	1	1	100	1	2.00	50.00
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun	4	1	1	100	1	2.00	50.00
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Laporan Tribunalan yang tersusun	16	4	4	100	4	8.00	50.00
		Jumlah Dokumen Laporan Bulanan yang tersusun	48	12	12	100	12	24.00	50.00
		Jumlah dokumen evaluasi Renstra yang tersusun	2	1	1	100	0	1.00	50.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang dikelola	45	9	9	100.00	10	19.00	42.22
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	56	14	14	100	14	28.00	50

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan tahun 2022 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	24	6	6	100	8	14.00	58
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	20	5	5	100.00	5	5.00	100
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan</i>	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	1,000	250	250	100	250	500.00	50
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	200	43	43	100	55	98.00	49
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	380	95	95	100	95	190.00	50
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	48	12	12	100	12	24.00	50
	<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	Jumlah arsip yang dikelola	6,500	2000	2,000	100	1500	3,500.00	54

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan tahun 2022 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16	4	4	100	4	4.00	100
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Surat yang dikelola	6,000	1500	1,500	100	1500	3,000.00	50
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Rekening yang dibayar selama satu tahun	48	36	36	100	48	36.00	75
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336	42	42	100.00	168	210.00	63
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	1	1	1	100	1	1.00	100
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	7	7	7	100	7	7.00	100

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan tahun 2022 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>Pemeliharaan Mebel</i>	Jumlah Mebel / Perlengkapan yang dipelihara	45	15	15	100	0	15.00	33
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah peralatan yang dipelihara	56	18	18	100	18	36.00	64
	<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Luas gedung kantor yang dipelihara	950	950	950	100	950	950.00	100
		Jumlah paket rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	3	0	0	0	1	1.00	33
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik								
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	380	90%	90.00	100.00	90	90.00	100
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahan kepada Camat</i>	Jumlah dokumen yang terlayani	3,500	2000	2,106	105.30	500	2,500.00	71

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan tahun 2022 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</i>	Jumlah dokumen layanan perizinan non usaha	800	200	200	100.00	200	400.00	50
	<i>Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan</i>	Jumlah dokumen layanan non perizinan	2,700	1800	1906	105.89	300	2,206.00	82
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan								
		Persentase desa yang tertib administrasi	83	41.66	41.660	100.00	75	75.00	90
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Tertib Administrasi	10	5	5	100.00	9	9.00	90
	<i>Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa</i>	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	48	12	12	100.00	12	24.00	50

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan tahun 2022 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	12	12	12	100.00	12	12.00	100
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	48	12	12	100	12	24.00	50
		Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinannya	12	12	12	100.00	12	12.00	100
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan	15	0	0	0	10	10.00	67
		Jumlah desa layak anak	12	12	12	100	12	12.00	100
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya	1	0	0	0	1	1.00	100
		Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa	12	12	12	100.00	12	12.00	100
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	218	76	76	100.00	46	122.00	56

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan tahun 2022 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</i>	Jumlah TP PKK Desa yang dibina	12	12	12	100.00	12	24.00	200
		Jumlah LPMD Yang Dibina	16	4	4	100	4	8.00	50
		Jumlah Karang Taruna Yang Dibina	30	12	12	100	6	18.00	60
		Jumlah RW Yang dibina	61	25	25	100	12	37.00	61
		Jumlah RT Yang Dibina	61	25	25	100	12	37.00	61
	<i>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>	Jumlah BUMDes yang dibina	4					0.00	0
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				0				
		Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertban Umum dan kebencanaan	100	100%	100.0	100.00	100	100.00	100

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan tahun 2022 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi Ketenteraman, Ketertban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan	48	12	12	100.00	12	24.00	50
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah/frekwensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	36	12	12	100	12	24.00	67
		2. Jumlah desa yang terfasilitasi penanggulangan bencana	12	12	12	100.00	12	12.00	100
		3. Jumlah Satlinmas desa yang dibina	36	12	12	100.00	12	24.00	67
		4. Jumlah anggota Paskibra yang terbina	18	10	10	100	6	16.00	89
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan tahun 2022 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	400	100%	100.00	100.00	100	100.00	100
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12	12	12	100.00	12	12.00	100
	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan desa</i>	Jumlah desa yang terbina administrasinya	12	12	12	100.00	12	12.00	100
	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset desa</i>	Jumlah desa Yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	12	12	12	100.00	12	12.00	100
		Jumlah desa lunas PBB	12	12	5	42	5	10.00	83
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	Jumlah perangkat desa yang terbina	210	150	150	100	24	174.00	83
	<i>Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	6	2	2	100		2.00	33
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	Jumlah kepala desa terpilih	2	0	0	0	2	2.00	100

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan tahun 2022 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>	Jumlah anggota BPD yang terbina	24	0	0	0	0	0.00	0
	<i>Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	Jumlah Perangkat Desa Terisi	21	0	0	0	5	5.00	24
	<i>Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	Jumlah peserta musrenbang Kecamatan	360	90	90	100	90	180.00	50

Sampai dengan berakhirnya triwulan IV tahun 2021 realisasi kinerja dan keuangan Kecamatan Salam adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota realisasi kinerja sebesar 100% dari target sebesar 100%. Realisasi kinerja meliputi 2 (dua) indikator yaitu :
 - a. Indikator Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah terealisasi sebesar 100% dari target 100%;
 - b. Indikator Persentase Ketecapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah terealisasi sebesar 100% dari target 100%.

Adapun dari Anggaran sebesar Rp. 1.842.033.774 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) dapat terealisasi sebesar Rp. 1.737.835.887 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 94,34 % dari pagu dengan kategori sangat tinggi. Realisasi dari program ini terutama didorong oleh kegiatan yang bersifat rutin seperti honor tenaga harian lepas, pembayaran listrik, telepon, internet, asuransi non ASN, serta Gaji dan Tunjangan ASN. Kegiatan lain juga dapat berjalan dengan baik sehingga serapan anggaran bisa dimaksimalkan.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP memiliki realisasi kinerja sebesar 90% sama dengan target sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100%. Dari pagu anggaran sebesar Rp. 30.609.500 (tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 30.502.445 (tiga puluh juta lima ratus dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) atau sebesar 99,65%% dari total pagu anggaran program. Pelaksanaan kegiatan dalam program ini mengalami beberapa perubahan dikarenakan adanya pembaharuan sistem dan tata cara pelayanan kepada masyarakat terutama dalam pelayanan administrasi kependudukan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase Desa Yang tertib Administrasi realisasi kinerja sebesar 41,66% sama dengan target sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100%. Adapun dari Anggaran sebesar Rp.

28.183.440,- (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 28.183.440 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 100% dari total pagu anggaran.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan memiliki realisasi kinerja sebesar 100%. Adapun dari Anggaran sebesar Rp 20.132.000,- (dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dapat terealisasi sebesar Rp 20.023.200 atau sebesar 99,46% dari total pagu anggaran.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan dapat terealisasi kinerjanya sebesar 100%. Dari total pagu anggaran Rp. 26.642.000 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dapat terealisasi sebesar Rp. 26.639.670 (dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar 99,99% dari total pagu anggaran.

Selama triwulan IV tahun 2021 kegiatan tetap berjalan dengan mempertimbangkan situasi dan ketentuan terkait perkembangan pandemi mengingat sebagian besar kegiatan di Kecamatan Salam adalah bersifat pembinaan dan koordinasi (mengundang orang luar). Kegiatan yang sempat tertunda atau belum maksimal sampai dengan triwulan III dioptimalisasikan di triwulan IV

Dari gambaran yang telah disampaikan di atas, rata-rata capaian kinerja yang dicapai pada triwulan IV adalah sebesar 100% dengan predikat Sangat Tinggi. Adapun penyerapan anggaran di PD Kecamatan Salam rata-rata di triwulan IV sebesar 98,69% dengan predikat Sangat Tinggi

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Salam ada 2 (dua) yaitu :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM);

Indikator ini tahun 2021 melampaui target. Hal ini didorong adanya upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Salam dalam rangka mempermudah pelayanan dan membantu pemenuhan layanan masyarakat secara lebih efisien terutama dalam masa pandemi. Layanan yang diberikan ternyata dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Selanjutnya di tahun 2022 dari target

sebesar 85 (baik) dapat tercapai 85,25 (baik). Angka ini memang turun dari tahun sebelumnya namun tetap sesuai dengan target. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan mekanisme dan perubahan di beberapa jenis layanan khususnya administrasi kependudukan. Banyak dari calon pengguna pelayanan yang belum mengerti sepenuhnya sehingga memerlukan perlakuan dan komunikasi atau pengarahan secara khusus. Adapun proyeksi sampai dengan tahun 2024 juga telah ditetapkan. Dan jika mengacu pada hasil tahun sebelumnya maka optimis target akhir tercapai

2. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Adanya regulasi baru turut mendorong adanya perubahan dalam formulasi penghitungan indikator ini. Namun demikian tahun 2021 target berhasil tercapai. Adapun dalam tahun 2022 proses pencapaian target masih terus berjalan. Menilik pada capaian sampai dengan triwulan II tahun 2022 maka optimis di akhir tahun target ini tercapai.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Salam Kabupaten Magelang

NO	Indikator	SP M/s tan dar nasi onal	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahu n 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahu n 2021 (thn n-2)	Tahu n 2022 (thn n-1)	Tahu n 2023 (tnn n)	Tah un 202 4 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)			84	85	86	87	87,14	85,25	86	87	
2	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			70,8 %	91,66 %	94,44 %	94,44 %	70,8 %	41,24 %	94,44 %	94,44 %	

Keterangan : blok abu-abu adalah capaian sd triwulan II tahun 2022

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

PD Kecamatan Salam merupakan Perangkat Daerah Koordinatif dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga berorientasi

utama pada kepuasan masyarakat yang tercermin dari indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik dalam Renstra Perangkat Daerah maupun RPJMD Kabupaten Magelang. Dalam pelaksanaan tugas tugasnya, terdapat tantangan maupun peluang sebagai berikut :

Tantangan:

- a. Tuntutan layanan Publik yang baik kepada masyarakat namun tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku;
- b. Pelayanan publik non diskriminatif, tepat sasaran, tepat waktu;
- c. Peningkatan kondusifitas lingkungan masyarakat;
- d. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang baik serta SDM aparatur yang lebih komunikatif dan berkompeten;
- e. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dan media sosial menuntut peran Kecamatan Salam untuk semakin responsif terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat;
- f. Koordinasi baik internal maupun eksternal yang perlu semakin ditingkatkan;
- g. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat;
- h. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*) menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
- i. Optimalisasi Sumber Daya Manusia ASN Kecamatan Salam.

Peluang :

- a. Ketepatan arah dan sasaran dalam perencanaan pembangunan melalui penyerapan aspirasi masyarakat dalam musrenbang;
- b. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM;
- c. Koordinasi yang harmonis dengan berbagai pihak baik forkompimcam, pemerintah desa, maupun instansi vertikal di tingkat kecamatan;

- d. Peningkatan koordinasi baik internal maupun dengan pihak eksternal Kecamatan Salam;
- e. Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat akan mempermudah dan mengefisienkan pelaksanaan tugas;
- f. Kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Situasi pandemi yang masih berlangsung berpengaruh terhadap belum maksimalnya proyeksi pendapatan daerah yang selanjutnya berpengaruh terhadap proyeksi belanja yang tidak sebesar tahun 2020 dan tidak jauh berbeda dengan tahun 2021 serta 2022

Secara umum salah satu prioritas di tahun 2023 adalah pemulihan akibat dampak pandemic covid 19.

Dengan alokasi dana yang ada, Kecamatan Salam berupaya mengkoordinasikan program-program pemerintah dan pemerintah daerah khususnya Dasa Cita ke 8 yaitu Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan serta berperan melaksanakan program, kegiatan, sub kegiatan sesuai tugas fungsinya untuk : *pertama*, memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. *Kedua*, berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dua hal tersebut didorong untuk meningkatkan koordinasi di tingkat kecamatan dan memaksimalkan pelayanan dalam rangka memudahkan urusan masyarakat dan memberikan edukasi menghadapi pandemi sehingga situasi semakin membaik yang selanjutnya diharapkan memicu pemulihan akibat dampak pandemi.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses yang akan dilaksanakan melalui Musrenbang berjenjang mulai dari tingkat dusun, Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dalam masing-masing jenjang dilakukan penggalian gagasan dengan pelibatan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh keagamaan, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan.

Proses musrenbang telah memunculkan skala prioritas pembangunan di berbagai bidang baik fisik, ekonomi, maupun sosial budaya. Proses yang telah dijalankan bertujuan untuk menggali usulan masyarakat sesuai dengan kebutuhan riil. Hasil usulan masyarakat dipergunakan untuk menganalisa

program-program prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan. Prioritas usulan program, kegiatan, ataupun sub kegiatan diusulkan dalam musrenbang kecamatan untuk ditampung, dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis. Adapun kecamatan selanjutnya berperan mengkoordinasi dan memfasilitasi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Nasional terdapat 7 poin yaitu : (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kecamatan Salam Kabupaten Magelang berperan dan mendukung prioritas nasional ke 7 (tujuh) yaitu **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**. Hal ini sejalan dengan visi, misi dalam RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024 serta tujuan dan sasaran PD Kecamatan Salam.

Visi dalam RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”** yang selanjutnya akan dicapai melalui 3 (tiga misi). Misi ke 3 (tiga) sesuai dengan tugas fungsi Kecamatan Salam yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah. Selain itu terdapat program prioritas pembangunan daerah yang ke – 8 (delapan) yaitu birokrasi dan tata kelola.

Kecamatan Salam menjabarkan lebih lanjut ke dalam :

Tujuan Perangkat Daerah :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran Perangkat Daerah :

Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Teknis Kewilayahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

Indikator sasaran ada dua yaitu :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)
2. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

3.2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah khususnya pada nomenklatur Program, Kegiatan, dan sub kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah

Sebagai salah satu implikasi dari regulasi tersebut kemudian dilaksanakan pemetaan dan pemutakhiran terhadap program/kegiatan/sub kegiatan mengacu pada regulasi yang ada. Selanjutnya dilaksanakan perubahan terhadap dokumen Rencana Strategis PD Kecamatan Salam 2019-2024 dengan menyesuaikan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator hasil pemetaan dan pemutakhiran.

Selanjutnya, terbit Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana regulasi ini mengatur indikator Sub Kegiatan sehingga hasil pemetaan dan pemutakhiran yang telah dilaksanakan sebelumnya kembali dilaksanakan penyesuaian dalam indikator seluruh sub kegiatan

Dengan demikian nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan tahun 2023 kini telah sesuai dengan regulasi

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Salam tahun 2023 terdiri dari 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Adapun Program, Kegiatan, dan sub kegiatan tersebut adalah:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - c. Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
 - 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Mebel;
 - c. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- d. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
 - a. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha;
 - b. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - b. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - 2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - a. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- D. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - c. Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - d. Sub kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;

- e. Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f. Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - g. Sub kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - h. Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.
- c. Penjelasan

Dalam Rencana Kerja Tahun 2023 ini terdapat Satu Kegiatan yaitu Kegiatan Pengadaan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya dana untuk menckupi kegiatan dimaksud. Namun demikian, kegiatan ini selanjutnya dilaksanakan di APBD Perubahan tahun 2022

Selanjutnya satu sub kegiatan yaitu sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah juga tidak dibiayai. Hal yang dipertimbangkan adalah jumlah ketersediaan dana dan alternatif pencapaian target kinerja sub dengan cara yang lain karena baik terbiayai maupun tidak target kinerja sub kegiatan ini tetap harus dilaksanakan

d. Tabel

Dalam table 3.1 berikut akan disajikan perbedaan indikator sub kegiatan yang direncanakan di tahun 2023 dengan indikator tahun sebelumnya

Tabel. 3.1
Perbandingan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

TAHUN 2021 DAN 2022				RENJA 2023	
No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Teknis Kewilayahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
			Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
			Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tersusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tersusun		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun		
			Jumlah Dokumen RPTK yang tersusun		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan tahunan yang tersusun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Jumlah Dokumen SOP yang tersusun		
			Jumlah Dokumen SP yang tersusun		
			Jumlah Dokumen Daftar Informasi Publik yang tersusun		

TAHUN 2021 DAN 2022				RENJA 2023	
No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3	4	5	6
			Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun (RTP dan Evaluasi RTP)		
			Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun		
		<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Laporan Tribulanan yang tersusun	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Jumlah Dokumen Laporan Bulanan yang tersusun		
			Jumlah dokumen evaluasi Renstra yang tersusun		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang dikelola	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang dikelola
		<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
		<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Aset Yang dikelola	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Aset Yang dikelola
		<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD</i>	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Tersusun	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD</i>	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Terlayani Administrasi Kepegawaiannya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Terlayani Administrasi Kepegawaiannya
		<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	Jumlah ASN Yang Terfasilitasi Penilaian Kinerjanya	<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan
		<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan</i>	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan</i>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
		<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

TAHUN 2021 DAN 2022				RENJA 2023	
No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3	4	5	6
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		
			Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan		
		<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	Jumlah arsip yang dikelola	<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Surat yang dikelola	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Rekening yang dibayar selama satu tahun	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
			Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara		
		<i>Pemeliharaan Mebel</i>	Jumlah Mebel / Perlengkapan yang dipelihara	<i>Pemeliharaan Mebel</i>	Jumlah Mebel yang Dipelihara
		<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah peralatan yang dipelihara	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
		<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Luas gedung kantor yang dipelihara	<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Jumlah paket rehabilitasi sedang / berat gedung kantor		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	

TAHUN 2021 DAN 2022					RENJA 2023	
No	Sasaran		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2		3	4	5	6
				Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang terlayani	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang terlayani
			Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen layanan perizinan non usaha	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan
			Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dokumen layanan non perizinan	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan
3	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Persentase desa yang tertib administrasi		Persentase desa yang tertib administrasi
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Tertib Administrasi	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Tertib Administrasi
			Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Jumlah dokumen profil desa yang tersusun		
				Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinannya		
				Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan		
				Jumlah desa layak anak		
				Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya		

TAHUN 2021 DAN 2022					RENJA 2023	
No	Sasaran		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2		3	4	5	6
				Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa		
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah TP PKK Desa yang dibina	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
				Jumlah LPMD Yang Dibina		
				Jumlah Karang Taruna Yang Dibina		
				Jumlah RW Yang dibina		
				Jumlah RT Yang Dibina		
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDes yang dibina	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
3			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketterban Umum dan kebencanaan		Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketterban Umum dan kebencanaan
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi Ketenteraman, Ketterban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi Ketenteraman, Ketterban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah/frekwensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				2. Jumlah desa yang terfasilitasi penanggulangan bencana		
				3. Jumlah Satlinmas desa yang dibina		
				4. Jumlah anggota Paskibra yang terbina		

TAHUN 2021 DAN 2022				RENJA 2023	
No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Persentase kegiatan yang dikoordinasikan		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan Peraturan Kepala Desa Yang Tersusun	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan desa	Jumlah desa yang terbina administrasinya	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset desa	Jumlah desa Yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Jumlah desa lunas PBB		
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa yang terbina	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah anggota BPD yang terbina		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa Terisi	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah peserta musrenbang Kecamatan	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

TAHUN 2021 DAN 2022					RENJA 2023	
No	Sasaran		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2		3	4	5	6
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah/frekwensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		
				Jumlah desa yang terfasilitasi penanggulangan bencana		
				Jumlah Satlinmas desa yang dibina		
				Jumlah anggota Paskibra yang terbina		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Program kerja yang direncanakan Kecamatan Salam merupakan bentuk realisasi strategi. *Outcome* dari program merupakan capaian untuk mewujudkan target sasaran perangkat daerah. Terdapat program-program yang harus dilaksanakan bersama oleh beberapa seksi. Meskipun demikian dengan mendasarkan pada hasil pemetaan dan pemutakhiran program, kegiatan, sub kegiatan maka diharapkan tetap jelas unit kerja penanggungjawab pada masing-masing indikator. Program selanjutnya dijabarkan secara lebih nyata dalam bentuk kegiatan.

Kegiatan merupakan bentuk kerja untuk menyelesaikan akar masalah. Terdapat beberapa kegiatan yang diampu oleh beberapa unit kerja setingkat eselon IV. Berdasarkan indikator capaian yang ditetapkan, diperlukan koordinasi dan pembagian tanggungjawab yang jelas serta sinergi yang kuat dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Rencana Kerja ini sudah disinkronkan dengan penyusunan Perubahan Rencana Strategis 2019-2024 termasuk regulasi Kementrian Dalam Negeri terbaru berkaitan dengan indikator sub kegiatan.

Guna melaksanakan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan untuk tahun 2023, Kecamatan Salam didukung dengan pagu anggaran indikatif sebesar Rp. 2.384.014.426 (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta empat belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah)

Pagu indikatif 2023 Terdiri dari pagu penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 2.023.928.605 (dua milyar dua puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah) dan selebihnya merupakan pagu indikatif belanja kegiatan pelayanan wajib dan kewilayahan yang bersifat teknis.

Secara lebih rinci Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, beserta pagu tahun 2023 terdapat dalam lampiran 1 dokumen Rencana Kerja ini

BAB V

PENUTUP

A. Hal Yang Menjadi Perhatian

Rencana Kerja Kecamatan Salam merupakan dokumen yang berisi pedoman pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan bagi Kecamatan Salam untuk kurun waktu 1 (satu) tahun di tahun 2023.

Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan berapa hal diantaranya adalah hasil evaluasi tahun 2021 dan tahun berjalan (2022), kesesuaian dengan Perubahan I Rencana Strategis perangkat daerah, serta regulasi yang berlaku.

Apabila terdapat situasi dan dinamika yang menyebabkan terganggunya pencapaian target serta adanya hasil evaluasi yang kurang baik maka akan dilakukan penyesuaian baik berupa penyesuaian terhadap dokumen perencanaan dan atau tata cara pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku

B. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan dokumen perencanaan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu pada pencapaian target. Setiap unit kerja mendukung target di atasnya yang bermuara pada pencapaian target kepala perangkat Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Guna mendukung pencapaian target Kepala Perangkat Daerah dan Organisasi maka setiap Unit segera mempersiapkan diri, mempelajari setiap perubahan target dan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pendukung. Dilaksanakan pula dialog kinerja untuk menentukan pembagian peran dan target hasil kepada setiap ASN

Salam, 8 Juli 2022

Kepala Kecamatan Salam



WIHARYANTO, S.H., M.M.

Penata Tk I

NIP. 19780417 199803 1 001

LAMPIRAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SALAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN										2,384,014,426			2,128,539,946
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,202,843,876			2,041,176,341
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										2,417,000			1,800,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	86 (baik)-	675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	600,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	8 Laporan	86 (baik)-	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	600,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	20 Laporan	86 (baik)-	742,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	600,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,038,428,605			1,887,644,041
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	16 Orang/bulan	86 (baik)-	2,023,928,605	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	1,877,294,041
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	13 Dokumen	86 (baik)-	14,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	10.350.000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										500,000			500,000
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	8 Laporan	86 (baik)-	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	500,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										1,200,000			500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Magelang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SALAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	16 Dokumen	86 (baik)-	1,200,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	500,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								17,600,000				11,200,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	250 Dokumen	86 (baik)-	600,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	600,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	162 Laporan	86 (baik)-	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	10,000,000
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	1500 Dokumen	86 (baik)-	2,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	600,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								27,162,000				23,862,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	86 (baik)-	2,400,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1,500,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	36 Laporan	86 (baik)-	24,762,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	22,362,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								115,536,271				115,670,300	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	86 (bak)-	45,150,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	30,800,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Magelang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SALAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	86 (bak)-	1,496,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	870,300	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	12 Unit	86 (bak)-	6,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	5,000,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	86 (bak)-	61,999,471	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	79,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								31,300,000					30,966,605	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								31,300,000					30,966,605	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	200 Dokumen	86 (baik)-	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP	100 %	500,000	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	86 (baik)-	30,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP	100 %	30,466,605	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								57,590,050					21,090,500	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								24,193,050					9,383,500	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	83,33 %	5 Lembaga	94.44 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	83,33 %	1,383,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	83,33 %	4 Laporan	94.44 %	21,693,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	83,33 %	8,000,500	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								33,397,000					11,707,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Magelang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SALAM

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SALAM					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
Kode	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
				Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur			Target				
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	83.33 %	5 Lembaga	94.44 %	31,897,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	83.33 %	11,157,000
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	83.33 %	1 Laporan	94.44 %	1,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	83.33 %	550,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								56,656,000				21,000,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								56,656,000				21,000,000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertban Umum dan kebencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	94.44 %	56,656,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertban Umum dan kebencanaan	100 %	21,000,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								35,624,500				14,306,500	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								35,624,500				14,306,500	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	24 Dokumen	94.44 %	2,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	100 %	550,000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	36 Dokumen	94.44 %	3,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	100 %	615,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	242 Dokumen	94.44 %	6,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	100 %	3,055,000
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	94.44 %	1,955,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	100 %	769,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Magelang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SALAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	24 Dokumen	94.44 %	2,683,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	100 %	1,000,000
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	94.44 %	1,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	100 %	807,500
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	94.44 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	100 %	807,500
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	94.44 %	16,666,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	100 %	6,702,000
TOTAL													2,384,014,426				2,128,539,946	